



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**



LAKIP 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NOMOR : LAKIP-124/ PW18/1/2013

TANGGAL : 18 JANUARI 2013

Ringkasan Eksekutif

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Sebagai auditor Presiden, Perwakilan BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa *outcome* dan *output*, serta penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Tahun 2012 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2012. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak enam dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara dua sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.
Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD	50%
2.	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%	100%
3.	Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya <i>Good Governance</i> pada 75% BUMN/BUMD	100%
4.	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda	100%

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
6.	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% K/L/Pemda	100%
7.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%	100%
8.	Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan	100%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 36 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2012. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan sebanyak 26 instansi dari 16 instansi target dalam PKP2T, atau mencapai 162,50% dari target sebesar 100%.
- b. Jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 4 dari 16 Pemda yang diasistensi oleh BPKP, atau mencapai 29,41% dari target sebesar 85%.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”, yang diukur dari jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) sebanyak 3 tindak lanjut dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD sebanyak 3 rekomendasi atau mencapai 100% dari target 100%.

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Atas IKU “persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”, Perwakilan BPKP melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 2 Pemda untuk mendorong seluruh Pemda tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan targetnya sebanyak 2 Pemda, maka diperoleh capaian IKU sebesar 100,00%.
- b. Atas IKU “persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”, Perwakilan BPKP melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau *Key Performance Indicator* (KPI) pada 4 BUMD/BLU/D dari 2 BUMD/BLU/D yang ditargetkan dalam PKP2T, atau mencapai 100%.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”, yang diukur berdasarkan jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan realisasi sebanyak 3 kelompok masyarakat, dengan capaian sebesar 100% atas target sebesar 3 kelompok.

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”, yang diukur berdasarkan jumlah Pemda yang opini LK WTP sebanyak 1 Pemda dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 16 Pemda dengan realisasi 6,25%, dengan capaian 100% atas target sebesar 6,25%.

Belum tercapainya realisasi IKU dominan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP.
- b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa *diagnostic*

assessment, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan kebijakan/*Standard Operating Procedure* (SOP).

6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% K/L/Pemda

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA”, yang diukur dari jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak 2 Pemda dari target sebanyak 16 Pemda, atau realisasi sebesar 12,50%, dengan capaian 100,00% atas target sebesar 12,50%.

7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. IKU “persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan antara realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT. Pada tahun 2012, jumlah realisasi penugasan adalah 297 atau 96,89% dari 305 rencana penugasan, dengan capaian 96,89% atas target sebesar 100%.
- b. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” diukur dari hasil revidi Inspektorat BPKP terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Pada tahun 2012, hasil revidi Inspektorat BPKP atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 tidak ada catatan sehingga capaiannya sebesar 100%.

8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, “jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” yang diukur dengan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG). Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 10 sistem informasi yang dimanfaatkan atau mencapai 100,00% dari target sebanyak 10 sistem informasi yang dimanfaatkan.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 menggunakan dana DIPA sebesar Rp12.802.123.000,00 atau 90,72% dari anggaran sebesar Rp14.111.854.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp1.300.217.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 20.079 OH atau 118,23% dari rencana sebanyak 16.983 OH.

Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2012 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan.

Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan evaluasi secara berkala metode bimbingan teknis/asistensi penyusunan laporan keuangan kepada pemerintah daerah
2. Melakukan penugasan hambatan kelancaran pembangunan atas masalah penyerahan *asset-asset* dari kabupaten induk ke kabupaten pemekaran.
3. Peningkatan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara:
 - a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain :
 - 1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
 - 2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraan SPIP.
 - b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.

4. Mendorong BPKP Pusat dalam pembentukan ke deputian BPKP yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda.
5. Pengadaan komputer dan perbaikan jaringan LAN, serta mengadakan PKS penerapan aplikasi SPPD.
6. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2012 dibawah 100%.